

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA TALANG**

JLN. KADEMANGAN NO. 04 Tlp. 0358 (-) Talang Kode Pos 64453



**SALINAN
PERATURAN DESA TALANG
NOMOR 2 TAHUN 2017**

TENTANG

**KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK
ASAL USUL DAN KEWENANGAN BERSKALA
DESA**

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA TALANG

PERATURAN DESA TALANG

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, maka perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2);
5. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 35);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TALANG
dan
KEPALA DESA TALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TALANG TENTANG KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
9. Program Desa adalah penjabaran kebijakan Pemerintah Desa dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Pemerintah Desa.
10. Kegiatan Desa adalah bagian dari program desa yang dilaksanakan oleh perangkat desa dengan mengerahkan sumber daya manusia. Peralatan, dana sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

BAB II
JENIS KEWENANGAN DESA

Pasal 2

- (1) Jenis Kewenangan Desa meliputi:
 - a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
 - b. kewenangan lokal berskala desa;
 - c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten dan
 - d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rincian kewenangan desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I Peraturan Desa ini.
- (3) Rincian kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II Peraturan Desa ini.

BAB III
PENYELENGGARA KEWENANGAN DESA

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa adalah penyelenggara utama kewenangan desa.
- (2) Dalam menyelenggarakan kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah desa dibantu oleh lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga tingkat desa lainnya.
- (3) BPD menyelenggarakan sebagian kewenangan desa sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
PENDANAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa didanai oleh APB Desa.
- (2) Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala desa selain didanai oleh APB Desa juga dapat didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB V
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Talang.

Ditetapkan di Talang
pada tanggal, 02 Februari 2017
KEPALA DESA TALANG

TTD

SUPARLAN

Diundangkan di TALANG
pada tanggal, 02 Februari 2017
KEPALA DESA TALANG

TTD

SUPARLAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya



LAMPIRAN 1
PERATURAN DESA TALANG
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

RINCIAN KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DESA DALAM BENTUK BIDANG, SUB BIDANG, KEGIATAN

BIDANG	SUB BIDANG	KEGIATAN
1	2	3
PEMERINTAHAN	Pengelolaan tanah kas desa	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengaturan tanah kas desa 2) Pengelolaan tanah kas desa 3) Pelaporan hasil tugas pengelolaan tanah kas desa
PEMBANGUNAN	Pengembangan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pembentukan kelompok gotong royong masyarakat 2) Penyelenggaraan gotong royong masyarakat 3) Penumbuhan swadaya masyarakat dalam pembangunan desa 4) Partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa 5) Pelaporan hasil tugas pengembangan peran masyarakat
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	Pembinaan lembaga dan hukum yang berlaku sebagai tradisi desa	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pembentukan lembaga penyelenggara tradisi desa 2) Penyelenggaraan kegiatan tradisi desa/dusun 3) Pelestarian berbahasa jawa dalam kehidupan masyarakat 4) Penyelenggaraan upaya perdamaian atas perselisihan anggota masyarakat 5) Pelaporan hasil tugas pembinaan lembaga dan hukum yang berlaku sebagai tradisi desa.

BIDANG	SUB BIDANG	KEGIATAN
1	2	3
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Pembinaan masyarakat kelembagaan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pembentukan lembaga kemasyarakatan desa 2) Penguatan pengurus lembaga kemasyarakatan desa 3) Fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan desa 4) Koordinasi, monitoring dan evaluasi kegiatan lembaga kemasyarakatan desa 5) Pelaporan hasil tugas pembinaan kelembagaan masyarakat



LAMPIRAN II
PERATURAN DESA TALANG
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

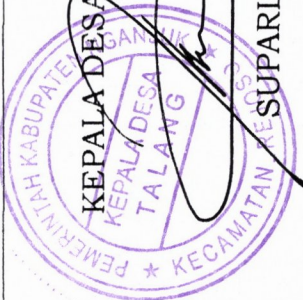
RINCIAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DALAM BENTUK BIDANG, SUB BIDANG, KEGIATAN

BIDANG	SUB BIDANG	KEGIATAN
1	2	3
PEMERINTAHAN	A. Pemerintahan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pembentukan organisasi pemerintah desa 2) Pelaksanaan pemilihan kepala desa 3) Pengangkatan perangkat desa 4) Pembentukan dan pembinaan Badan Permusyawaratan Desa 5) Penetapan dan penegasan batas desa 6) Penataan dan pengelolaan wilayah 7) Penyusunan dan penetapan Peraturan Desa 8) Penyelenggaraan kerja sama desa 9) Pembinaan ketertarikan dan ketertiban 10) Upaya perlindungan masyarakat
	B. Keuangan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penetapan APB Desa, Perubahan APB dan pertanggungjawaban APB Desa 2) Pengelolaan dan peningkatan pendapatan desa 3) Penyelenggaraan tata kelola keuangan
	C. Kependudukan dan catatan sipil	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pelaksanaan registrasi penduduk 2) Fasilitasi pelayanan kependudukan dan catatan sipil
PEMBANGUNAN	A. Sarana dan prasarana desa	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat 2) Pembangunan drainase lingkungan 3) Pembangunan dan pengelolaan fasilitas umum Desa 4) Pembangunan Sarana dan Prasarana kantor Desa

BIDANG	SUB BIDANG	KEGIATAN
1	2	3
		5) pembangunan jalan dan jembatan di lingkungan desa 6) Pengelolaan energi baru dan terbarukan 7) Pengelolaan jaringan irigasi desa
	B. Pendidikan	1) Pembinaan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 2) Pembinaan penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat 3) Pengembangan dan pembinaan perpustakaan desa, taman bacaan masyarakat kelompok belajar/ sanggar belajar
	C. Kesehatan	1) Pengelolaan Tanaman Obat Keluarga (TOGA) 2) Pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di desa 3) Pengembangan gerakan imunisasi dan gizi keluarga 4) Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu, pos kesehatan desa, poliklinik desa, desa siaga, desa sehat
	D. Budaya dan Pariwisata	1) Pengembangan seni budaya masyarakat 2) Pengembangan dan pembinaan sanggar seni 3) Pengelolaan obyek wisata di desa

BIDANG	SUB BIDANG	KEGIATAN
1	2	3
	E. Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan kelembagaan petani 2) Pengembangan lumbung pangan 3) Pengelolaan sumber daya air untuk pertanian 4) Pembinaan perkumpulan petani pemakai air 5) Pengembangan alat pertanian 6) Pengelolaan pasar desa 7) Pembinaan koperasi dan usaha kecil mikro dan menengah 8) Pembinaan lembaga keuangan di desa 9) Pengembangan teknologi tepat guna
	F. Lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pelestarian sumber daya alam 2) Pengembangan kawasan hutan desa 3) Pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan
	G. Pemberdayaan keluarga	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pemberdayaan dan peningkatan peranan perempuan 2) Pembinaan keluarga berencana 3) Pengembangan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) 4) Pembinaan kelompok bina keluarga
	H. Pemuda dan olah raga	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pembinaan karang taruna 2) Pengembangan olah raga masyarakat
	I. Perencanaan pembangunan desa	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penetapan RPJM Desa dan RKP Desa 2) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa

BIDANG	SUB BIDANG	KEGIATAN
1	2	3
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	A. Kesatuan bangsa	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan 2) Pembinaan kerukunan hidup bernegara. berbangsa. beragama dan bermasyarakat
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	B. Penanggulangan Bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penanganan bencana lokal desa 2) Pembentukan dan pembinaan satuan tugas penanganan bencana tingkat desa
	A. Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1) Fasilitasi penyandang masalah sosial 2) Pembinaan pekerja sosial masyarakat dan organisasi sosial 3) Pembinaan organisasi pemuda 4) Pembinaan ketenagakerjaan di desa 5) Penanggulangan kemiskinan
	B. Pembinaan kelembagaan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pembentukan dan pembinaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat 2) Pembentukan dan fasilitasi paralegal desa



 KEPALA DESA TALANG
 SUPARLAN

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TALANG
KECAMATAN REJOSO
KABUPATEN NGANJUK**

**KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TALANG**

NOMOR: 002/ BPD / 2017

TENTANG

**KESEPAKATAN BERSAMA TERHADAP PERATURAN DESA TALANG
TENTANG KEWENANGAN BERDASARKAN
HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Talang tentang Kesepakatan Bersama Terhadap Peraturan Desa Talang tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa;
5. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Memperhatikan: Berita Acara Nomor:188/002/ 411.517.2015 / 2017 tentang Kesepakatan Bersama Antara Kepala Desa Talang dengan Badan Permusyawaratan Desa Talang terhadap Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TALANG
TENTANG KESEPAKATAN BERSAMA TERHADAP PERATURAN

DESA TALANG TENTANG KEWENANGAN BERDASARKAN HAK
ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

- KESATU** : Menyetujui Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Talang
pada tanggal, 16 Januari 2017



KETUA,
MOH. IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA TALANG

BERITA ACARA
NOMOR: 188 /02/411.517.2015/2017

TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA KEPALA DESA TALANG
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TALANG TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL
USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pada hari SENIN tanggal, ENAM BELAS bulan JANUARI Tahun DUA
RIBU TUJUH BELAS kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SUPARLAN : Kepala Desa Talang, dalam hal ini bertindak dan atas nama Desa Talang yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. MOH. IMRON : Ketua BPD Desa Talang, dalam hal ini bertindak dan atas nama BPD Desa Talang yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
2. PIHAK PERTAMA menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tersebut kepada Bupati untuk dievaluasi secara redaksional, berkaitan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersedia untuk melakukan penyempurnaan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Talang, 16 Januari 2017



**DAFTAR HADIR
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**

Desa : TALANG
 Kecamatan : REJOSO
 Hari / Tanggal : 16 Januari 2017
 Tempat : Balai Desa Talang
 Acara : Rapat Pembahasan Peraturan Desa Talang Tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	MOH. IMRON	Ketua BPD	1 
2	SUGENG WIYONO	Wakil Ketua BPD	2 
3	MOH. SAMSURI	Sekretaris BPD	3 
4	SAKIYA	Anggota BPD	4 
5	PRAWOTO	Anggota BPD	5 
6	ALI NUR CAHYO	Anggota BPD	6 
7	MISRI	Anggota BPD	7 

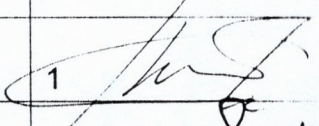
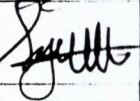
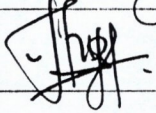
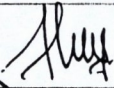
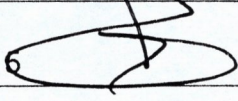
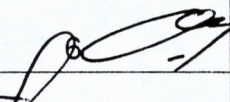
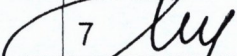
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)




MOH. IMRON

DAFTAR HADIR APARAT PEMERINTAHAN DESA

Desa : TALANG
 Kecamatan : REJOSO
 Hari / Tanggal : 16 Januari 2017
 Tempat : Balai Desa Talang
 Acara : Rapat Pembahasan Peraturan Desa Talang Tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SUPARLAN	Kepala Desa	1 
2	SUYONO	Kamituwo	2 
3	WAHYUDI	Jogotirto	3 
4	MOH. ALI MURTADHO	Jagoboyo I	4 
5	SUROTO	Jogoboyo II	5 
6	PARYAKUN	Kebayan I	6 
7	CAHYO PRASETYO	Kebayan II	7 

KEPALA DESA TALANG

 SUPARLAN